



Analisis Jurnal Penyesuaian Pendapatan dan Beban Dalam Sistem Akuntansi PPKD dan SKPD: Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kota Bandung

Nasywa Muthia Nurazizah*, Nadhilah Hafshah, Ai Fatimatuz Zahro, Anando Ridho Raschani, Rimi Gusliana Mais

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Abstrak: Penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik Indonesia merupakan salah satu bentuk reformasi tata kelola keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala terutama dalam proses jurnal penyesuaian pendapatan dan beban antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jurnal penyesuaian pendapatan dan beban pada sistem akuntansi Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta menilai kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan content analysis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyesuaian pendapatan dan beban masih belum optimal karena perbedaan basis akuntansi antarunit, keterbatasan SDM, dan belum maksimalnya pemanfaatan sistem SIPD. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan laporan keuangan dan menurunkan akuntabilitas publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi sistem keuangan, pelatihan teknis, serta internalisasi nilai stewardship dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan keuangan publik.

Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik, Jurnal Penyesuaian, Pendapatan Dan Beban, PPKD, SKPD, Akuntabilitas Publik

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3867>

*Correspondence: Nasywa Muthia Nurazizah

Email: nanasazizah.12@gmail.com

Received: 12-10-2026

Accepted: 12-11-2026

Published: 12-12-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The implementation of accrual-based accounting in the Indonesian public sector is a form of regional financial governance reform aimed at increasing transparency and public accountability. However, in practice, various obstacles remain, particularly in the process of adjusting entries for revenue and expenses between Regional Financial Management Officers (PPKD) and Regional Work Units (SKPD). This study aims to analyze the implementation of income and expense adjustment entries in the Bandung City Education Office's accounting system and assess its compliance with accrual-based Government Accounting Standards (SAP). The method used is a qualitative descriptive approach with a content analysis approach to the 2023 regional government financial reports. The results indicate that the income and expense adjustment process is still suboptimal due to differences in accounting bases between units, limited human resources, and the suboptimal utilization of the SIPD system. This condition results in delays in financial reporting and reduces public accountability. This study emphasizes the importance of financial system integration, technical training, and internalization of stewardship values in increasing transparency and efficiency of public financial reporting.

Keywords: Public Sector Accounting, Adjustment Journal, Income and Expenses, PPKD, SKPD, Public Accountability

Pendahuluan

Isu Global

Transformasi sistem akuntansi sektor publik di berbagai negara saat ini menjadi salah satu agenda strategis reformasi tata kelola pemerintahan. Pergeseran dari sistem berbasis kas menuju sistem berbasis akrual merupakan upaya untuk menciptakan pelaporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan relevan bagi pengambilan keputusan publik. Menurut (Ashari, 2025), akuntansi akrual di sektor publik memungkinkan pemerintah mencatat transaksi ekonomi saat hak dan kewajiban timbul, bukan hanya ketika kas berpindah tangan. Hal ini membuat laporan keuangan pemerintah mencerminkan posisi keuangan yang lebih nyata, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas.

Secara global, penerapan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan publik. Negara-negara seperti Selandia Baru, Inggris, dan Australia telah berhasil menerapkan IPSAS dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam transparansi fiskal dan efisiensi anggaran. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasi akuntansi akrual masih menghadapi tantangan struktural dan kultural (Meliawati et al., 2022).

Di Indonesia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mulai diimplementasikan penuh sejak tahun 2015. Tujuan utama SAP berbasis akrual adalah menyediakan informasi keuangan yang komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu menyajikan laporan keuangan secara akurat, khususnya terkait jurnal penyesuaian pendapatan dan beban pada entitas pelaksana anggaran seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Ramadhani & Afiqoh, 2025).

Kegagalan dalam menyesuaikan jurnal pendapatan dan beban bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan menunjukkan lemahnya integrasi antara sistem akuntansi dan fungsi pengawasan keuangan publik. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung menjadi salah satu entitas penting yang menghadapi tantangan besar karena besarnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBD. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung tahun 2024, sektor pendidikan menempati porsi belanja tertinggi, mencapai 28,7% dari total APBD. Hal ini menunjukkan urgensi penerapan akuntansi yang akurat, terutama pada tahap jurnal penyesuaian pendapatan dan beban.

Fenomena (Idealitas dan Realita)

Secara ideal, penerapan SAP berbasis akrual diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan dan beban harus diakui secara akrual agar laporan keuangan mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. Misalnya, pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta retribusi pendidikan harus diakui saat hak diterima, bukan hanya ketika kas masuk ke rekening daerah. Demikian pula, beban seperti gaji guru, tunjangan, dan belanja modal

pendidikan harus dicatat saat kewajiban timbul, bukan hanya ketika pembayaran dilakukan (Aprilia, n.d.).

Namun realitanya, pelaksanaan di lapangan sering kali jauh dari ideal. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, masih banyak pemerintah daerah yang belum melakukan penyesuaian jurnal dengan benar, terutama pada sektor pendidikan. Dalam kasus Dinas Pendidikan Kota Bandung, beberapa masalah yang muncul meliputi:

- a. Keterlambatan Rekonsiliasi antara SKPD dan PPKD. Banyak laporan keuangan SKPD yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pelaporan PPKD, sehingga menyebabkan selisih pada laporan realisasi anggaran.
- b. Kurangnya Kompetensi Aparatur dalam Akuntansi Akrual. Menurut penelitian (Safitri, n.d.), banyak ASN yang belum memahami prinsip pengakuan pendapatan dan beban berbasis akrual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam jurnal penyesuaian.
- c. Keterbatasan Sistem Informasi Keuangan (SIPD). Walaupun pemerintah telah menggunakan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*, integrasi data antara unit pengguna anggaran (SKPD) dan pengelola keuangan (PPKD) masih sering mengalami kendala teknis.
- d. Rendahnya Kualitas Audit Internal. Audit internal di Dinas Pendidikan sering kali hanya bersifat formalitas dan belum mampu mendeteksi kesalahan sistematis dalam jurnal penyesuaian (Wiyana et al., 2023).

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas akuntansi akrual dengan realitas implementasi di lapangan. Fenomena tersebut menandakan perlunya peningkatan literasi akuntansi sektor publik serta koordinasi yang lebih baik antara PPKD dan SKPD untuk memastikan laporan keuangan daerah disajikan sesuai prinsip akrual yang benar.

Research Gap

Berdasarkan kajian literatur terkini, terdapat beberapa celah penelitian (research gap) yang relevan dengan topik ini:

- a. Kesenjangan Implementasi SAP Akuntansi Akrual di Level Operasional.
Penelitian (Gollah et al., 2025), hanya berfokus pada evaluasi kinerja anggaran, namun belum mengkaji bagaimana penyesuaian pendapatan dan beban dilakukan antarunit SKPD–PPKD.
- b. Minimnya Kajian Spesifik pada Sektor Pendidikan Daerah.
Sebagian besar penelitian akuntansi sektor publik meneliti pemerintah daerah secara umum (misalnya Meliawati et al., 2022), bukan instansi tematik seperti Dinas Pendidikan yang memiliki dinamika kompleks karena sifat multi-sumber pendanaannya (DAK, BOS, APBD).
- c. Belum Ada Analisis Terpadu tentang Mekanisme Penyesuaian Jurnal Pendapatan dan Beban.

Ramadhani & Afiqoh (2025) membahas pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah, namun tidak mengulas proses teknis jurnal penyesuaian dalam SAPD.

d. Kurangnya Penelitian Empiris Berbasis Kasus di Kota Besar.

Sebagian besar studi dilakukan di daerah kabupaten, seperti Palu (Gollah et al., 2025) dan Pangkep (Wiyana et al., 2023). Belum banyak penelitian yang menyoroti pemerintah kota besar seperti Bandung, padahal kompleksitas keuangannya jauh lebih tinggi.

e. Minimnya Evaluasi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan.

Aprilia (2025) menemukan bahwa SIPD belum mampu memastikan konsistensi data antara SKPD dan PPKD, namun belum ada kajian yang meneliti dampaknya terhadap penyesuaian pendapatan dan beban.

Research gap tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi penting untuk menjembatani kesenjangan teoritis dan empiris antara konsep akuntansi akrual dan praktik penyusunan jurnal di tingkat SKPD dan PPKD.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa urgensi strategis, baik secara akademik maupun praktis:

- Kontribusi Akademik: Menambah literatur tentang akuntansi akrual di sektor publik, khususnya pada konteks penyesuaian pendapatan dan beban yang masih jarang dikaji secara spesifik.
- Kontribusi Praktis: Menjadi dasar bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan Kota Bandung, dalam memperbaiki mekanisme pelaporan keuangan dan koordinasi antarunit keuangan.
- Kontribusi Kebijakan: Memberikan masukan bagi Kementerian Dalam Negeri dan BPKAD terkait penyempurnaan penerapan SIPD dan pedoman jurnal penyesuaian berbasis SAP akrual.
- Dampak Sosial: Transparansi dan akurasi pelaporan keuangan di sektor pendidikan akan berdampak langsung pada efektivitas penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dengan demikian, topik ini menjadi penting untuk dikaji tidak hanya dari sisi akuntansi teknis, tetapi juga dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan akuntabilitas publik.

Kajian Teori

Teori Akuntabilitas Publik (*Public Accountability Theory*)

Dalam konteks Indonesia, akuntabilitas publik diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO). Semua laporan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada pemerintah pusat) dan horizontal (kepada masyarakat) (Ramadhani & Afiqoh, 2025).

Menurut Harun et al. (2020), akuntabilitas publik bukan hanya tentang pelaporan angka, tetapi juga tentang *responsibility* (tanggung jawab) dan *answerability* (kesediaan

menjelaskan keputusan keuangan). Pemerintah daerah dituntut tidak hanya melaporkan bahwa dana telah digunakan, tetapi juga menjelaskan sejauh mana dana tersebut memberikan manfaat publik. Dalam hal ini, jurnal penyesuaian pendapatan dan beban memiliki peran penting sebagai wujud pengakuan yang tepat waktu dan akurat atas transaksi yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Teori akuntabilitas publik menekankan bahwa transparansi laporan keuangan bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apabila terjadi kesalahan pencatatan atau keterlambatan penyesuaian jurnal pendapatan dan beban, hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik (Putri, 2023). Oleh karena itu, sistem akuntansi daerah harus mampu menjamin bahwa proses jurnal penyesuaian dilakukan sesuai prinsip akrual dan standar SAP agar laporan keuangan dapat diandalkan (*reliable*).

Teori Stewardship

Dalam penerapan akuntansi sektor publik, teori ini menjelaskan hubungan moral dan profesional antara pejabat pengelola keuangan (PPKD) dan unit pelaksana anggaran (SKPD). Mereka harus bekerja dalam semangat kepercayaan dan kolaborasi, bukan semata hubungan kontraktual. Menurut Anthony dan Govindarajan (2020), stewardship mengandung prinsip bahwa setiap pengelola sumber daya publik memiliki tanggung jawab moral untuk mencapai tujuan organisasi dan melaporkannya secara jujur.

Meliawati et al. (2022) menegaskan bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi akrual tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sistem, tetapi juga oleh lemahnya semangat stewardship di kalangan aparatur. Banyak pegawai yang masih menganggap penyusunan jurnal penyesuaian sekadar kewajiban administratif, bukan bagian dari komitmen moral terhadap transparansi publik.

Teori stewardship berimplikasi bahwa efektivitas sistem akuntansi daerah tidak hanya bergantung pada teknologi dan regulasi, tetapi juga pada karakter dan integritas sumber daya manusia yang mengelolanya. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kota Bandung, teori ini relevan karena keberhasilan pencatatan dan penyesuaian pendapatan serta beban sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara staf keuangan SKPD dan PPKD sebagai steward anggaran publik.

Sintesis Literatur Terkait

Banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti peran sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik.

Ramadhani & Afiqoh (2025) menemukan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah dan penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Safitri (2024) menambahkan bahwa pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan ketepatan pencatatan akrual. Namun demikian, sebagian besar penelitian ini hanya berhenti pada tataran *compliance* (kepatuhan) tanpa menelusuri proses penyesuaian jurnal yang menjadi inti pelaporan keuangan berbasis akrual.

Penelitian Aprilia (2025) pada pemerintah daerah di Palembang menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pengakuan antara laporan SKPD dan PPKD karena keterbatasan integrasi sistem informasi keuangan. Sementara itu, Wiyana et al. (2023) menyoroti pentingnya transparansi laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAP akrual di daerah masih menghadapi hambatan koordinatif dan teknis.

Penelitian internasional oleh Harun et al. (2020) juga menyoroti bahwa reformasi akuntansi publik di Indonesia menghadapi dilema antara idealisme modernisasi dan realitas birokrasi. Dalam konteks Dinas Pendidikan, hal ini terlihat dari ketergantungan unit keuangan terhadap instruksi pusat tanpa inisiatif lokal untuk menyempurnakan sistem pencatatan.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan SAP berbasis akrual → diharapkan meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan.
- b. Proses jurnal penyesuaian pendapatan dan beban → menjadi titik kritis dalam mencerminkan realitas ekonomi entitas pemerintah daerah.
- c. Koordinasi antara SKPD dan PPKD → berperan penting dalam menyinkronkan data keuangan, terutama pada sektor pendidikan yang kompleks dan multi-sumber pendanaan.
- d. Peran akuntabilitas publik dan stewardship → menjadi fondasi etis dan konseptual dalam memastikan bahwa sistem akuntansi daerah tidak hanya patuh pada standar, tetapi juga berorientasi pada tanggung jawab sosial dan moral terhadap publik.

Metodologi

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** deskriptif dengan metode analisis isi (content analysis). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus memahami makna, bukan menguji hubungan antarvariabel numerik. Menurut Safitri (2024), pendekatan kualitatif dalam akuntansi publik memungkinkan peneliti menafsirkan proses dan perilaku aparatur dalam konteks kebijakan keuangan daerah.

Metode analisis isi digunakan untuk mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), laporan realisasi anggaran (LRA), dan laporan operasional (LO) Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2023. Tujuannya adalah menilai sejauh mana jurnal penyesuaian pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)* berbasis akrual.

Pendekatan ini juga sejalan dengan temuan Ramadhani & Afiqoh (2025) yang menegaskan pentingnya analisis interpretatif terhadap laporan keuangan daerah untuk mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan SAP di level SKPD.

Objek penelitian meliputi:

- a. Laporan Keuangan SKPD (2023) — fokus pada jurnal penyesuaian pendapatan & beban.
- b. Dokumen Pedoman Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang digunakan Dinas Pendidikan.
- c. Koordinasi teknis antara PPKD dan SKPD dalam proses pelaporan dan rekonsiliasi keuangan.

Jenis dan Sumber Data**Data Sekunder**

Berupa dokumen resmi:

- a. LKPD Kota Bandung 2023
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
- c. Opini Audit BPK 2023

Menurut Aprilia (2025), kombinasi data dokumen merupakan strategi efektif untuk memahami pelaksanaan akuntansi akrual di sektor publik yang melibatkan banyak entitas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama:

- a. Studi Dokumentasi

Analisis mendalam terhadap jurnal penyesuaian di akhir periode, dengan fokus pada akun pendapatan transfer, belanja operasional, dan beban penyusutan aset pendidikan. Menurut Putri (2023), dokumentasi laporan keuangan SKPD menjadi dasar penting untuk menilai kesesuaian implementasi SAP akrual.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang terdiri dari:

- a. Penyajian Data – menyusun tabel, dan narasi hubungan antara SKPD dan PPKD.
- b. Penarikan Kesimpulan – menginterpretasikan pola kesalahan dan kendala dalam jurnal penyesuaian.

Analisis isi (content analysis) dilakukan dengan menafsirkan isi laporan keuangan secara sistematis dan obyektif, untuk menemukan kesesuaian antara praktik akuntansi dan prinsip SAP (Rosana et al., n.d.). menekankan bahwa content analysis cocok digunakan dalam penelitian akuntansi publik karena mampu mengungkap makna kebijakan dan praktik administratif di balik data keuangan.

Validitas dan Keabsahan Data

Validitas data diuji dengan empat kriteria menurut Simanjuntak et al. (2024):

- a. Transferabilitas (Transferability) — menyajikan konteks penelitian secara rinci agar bisa diaplikasikan pada daerah lain.
- b. Dependabilitas (Dependability) — memastikan prosedur analisis dilakukan secara konsisten dan terukur.
- c. Konfirmabilitas (Confirmability) — memastikan hasil analisis berasal dari data, bukan interpretasi subjektif peneliti.

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

- Analisis jurnal penyesuaian pendapatan dan beban pada Dinas Pendidikan Kota Bandung
- Periode analisis 2023, yang dianggap paling mencerminkan penerapan SAP akrual pasca-adopsi SIPD baru.
- Tidak mencakup evaluasi kinerja keuangan keseluruhan pemerintah daerah.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Sistem Akuntansi PPKD dan SKPD di Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2015 melalui integrasi *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)* ke dalam aplikasi *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*. Secara struktural, PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) berfungsi sebagai pengelola dan konsolidator laporan keuangan seluruh SKPD, sedangkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan operasionalnya.

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung menjadi salah satu SKPD terbesar dengan beban administratif tinggi, mengingat besarnya dana transfer dan alokasi fungsi pendidikan. Berdasarkan *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023*, Dinas Pendidikan mengelola lebih dari Rp 2,8 triliun anggaran, yang terdiri atas pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana BOS, dan belanja pegawai serta non-pegawai.

Namun, hasil studi awal terhadap laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan operasional (LO) menunjukkan adanya perbedaan material antara nilai pendapatan dan beban pada dokumen SKPD dan rekapitulasi PPKD, khususnya pada akun pendapatan transfer dan beban barang/jasa. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa proses jurnal penyesuaian (*adjustment entries*) belum sepenuhnya dilakukan dengan prinsip akrual yang benar.

Analisis Praktik Penyesuaian Pendapatan dan Beban

Penyesuaian Pendapatan

Dalam praktiknya, SKPD melakukan pencatatan pendapatan ketika dana diterima kas (basis kas), sementara PPKD melakukan pengakuan berdasarkan hak yang telah timbul (basis akrual). Hal ini menyebabkan perbedaan pengakuan pada akhir periode pelaporan. Misalnya, dana BOS yang diterima di akhir Desember sering kali dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan oleh SKPD, padahal menurut SAP harus diakui sebagai pendapatan diterima dimuka jika belum digunakan.

Penelitian Safitri (2024) mendukung temuan ini bahwa banyak SKPD belum memahami perlakuan akrual atas pendapatan transfer, sehingga sering terjadi overstatement pada laporan realisasi anggaran. Hal serupa ditemukan juga oleh Aprilia (2025) di Pemerintah Kota Palembang, di mana perbedaan pengakuan pendapatan antarunit menyebabkan kesulitan konsolidasi laporan keuangan daerah.

Di Dinas Pendidikan Kota Bandung, fenomena ini tampak pada pencatatan pendapatan BOS yang belum disesuaikan dengan jadwal realisasi kegiatan sekolah. Berdasarkan wawancara dengan bagian keuangan SKPD, hal ini terjadi karena sistem SIPD belum otomatis menyesuaikan jurnal akrual untuk transaksi transfer yang belum direalisasikan. Akibatnya, PPKD harus melakukan penyesuaian manual di akhir tahun anggaran, yang meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan penyusunan laporan keuangan.

Penyesuaian Beban

Sementara itu, pada sisi beban, permasalahan utama muncul pada pengakuan belanja barang/jasa dan beban penyusutan. SKPD umumnya mencatat beban ketika pembayaran dilakukan, bukan saat kewajiban timbul. Misalnya, kontrak pengadaan alat pendidikan yang selesai di akhir Desember tetapi dibayar Januari tahun berikutnya sering tidak diakui sebagai beban tahun berjalan.

Putri (2023) menjelaskan bahwa ketidaktepatan pengakuan beban disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi data antara bagian keuangan dan bagian aset. Dalam kasus Dinas Pendidikan Kota Bandung, hal ini terbukti dari perbedaan nilai penyusutan aset pendidikan antara laporan SKPD dan konsolidasi PPKD sebesar 3,8% pada tahun 2023.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terjadi dual basis accounting antara unit operasional dan unit pengelola keuangan, di mana SKPD cenderung menggunakan basis kas sementara PPKD sudah sepenuhnya menerapkan basis akrual.

Analisis terhadap dokumen laporan keuangan Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2023 menunjukkan bahwa proses jurnal penyesuaian dilakukan terutama untuk akun pendapatan transfer, pendapatan retribusi, beban operasional, dan penyusutan aset.

Berikut merupakan ringkasan hasil temuan yang diolah dari dokumen Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2023:

Tabel 1. Gabungan Pendapatan dan Beban Dalam dokumen Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2023.

| Uraian Transaksi | Akun Debit | Akun Kredit | Nilai (Rp) |
|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Pendapatan BOS diterima Desember 2023 namun belum digunakan | Pendapatan Diterima Dimuka | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.450.000.000 |
| Belanja barang untuk kegiatan pembelajaran belum dibayar (invoice Desember 2023) | Beban Barang dan Jasa | Utang Belanja | 1.125.000.000 |
| Pendapatan retribusi pendidikan yang belum ditagih | Piutang Pendapatan Retribusi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 365.000.000 |
| Penyusutan aset bangunan sekolah | Beban Penyusutan Gedung | Akumulasi Penyusutan Gedung | 785.000.000 |

| Uraian Transaksi | | Akun Debit | | Akun Kredit | | Nilai (Rp) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|-------------|
| Pendapatan hibah buku dari yayasan belum diakui | Aset Buku Perpustakaan | Pendapatan Hibah Barang | | | | 120.000.000 |
| Belanja honorarium kegiatan yang sudah dilakukan tapi belum dibayar | Beban Honorarium | Utang Honorarium | | | | 210.000.000 |
| Koreksi atas pendapatan BOS yang salah tahun anggaran | Pendapatan Tahun Berjalan | BOS Koreksi Pendapatan Tahun Lalu | | | | 95.000.000 |
| Beban listrik sekolah Desember Januari 2024 | Beban Utilitas | Utang Beban | | | | 43.000.000 |
| Pengembalian kegiatan terealisasi | dana tidak Ditanggungkan | Pendapatan Kas di Kas Daerah | | | | 180.000.000 |
| Pendapatan gedung sewa dibayar di muka untuk 2024 | Kas di Kas Daerah | Pendapatan Diterima Dimuka | | | | 60.000.000 |

Berita Pendukung Transparansi Dinas Pendidikan Kota Bandung

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

Beranda Profil Layanan Publikasi PPID Kontak Kami

Farhan mengungkapkan, hingga Jumat, 20 Juni 2025, sebanyak 47.500 calon peserta didik telah melakukan pendataan melalui sistem SPMB.

Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap pendidikan harus diimbangi dengan sistem seleksi yang adil dan akuntabel.

"Ini menjadi indikator bahwa sistem penerimaan yang transparan sangat krusial. Karena itu, penandatanganan pakta integritas hari ini bukan hanya seremonial, tapi bentuk niat kita menjaga kualitas kerja dan integritas layanan publik," tegas Farhan.

Farhan memastikan, pola pengawasan tahun ini diperketat. Ia bersama Wakil Wali Kota Erwin akan mengirimkan tim khusus yang tidak diketahui oleh publik untuk memantau langsung ke sekolah-sekolah, terutama yang tingkat peminatnya tinggi.

"Kita tidak bisa sendiri. Ada dukungan dari Dandim, Wakapolres, hingga Kejari. Kita kompak jaga proses ini. Kalau ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, saya siap minta dukungan aparat. Bahkan sampai minta tolong Pak Menteri kalau perlu," ujarnya sambil menambahkan bahwa upaya intervensi politik akan dihadapi bersama DPRD dan unsur pimpinan lainnya.

Farhan mengaku, hingga saat ini belum ditemukan transaksi mencurigakan dalam proses SPMB.

"Alhamdulillah tidak ada pelaku yang terbukti. Mereka mundur teratur ketika kita gebrak-gebrak. Pencegahan jadi langkah utama," ucapnya.

Wali Kota Bandung Tegaskan Tak Ada Toleransi Pungli di SPMB

03-06-2025

03-06-2025

SPMB Kota Bandung: 2.675 Murid Baru Ditempatkan di SMP Negeri Melalui Tahap Penempatan Afirmasi RMP

27-05-2025

Gambar 1. Kepala Sekolah Negeri Kota Bandung Tekan Pakta Integritas, Pastikan SPMB Transparansi dan Akuntabel

Upaya peningkatan transparansi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung kembali diperkuat dengan publikasi berita resmi mengenai proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tahun 2025. Meskipun berita ini terbit pada 20 Juni 2025, isi dan kebijakannya merupakan kelanjutan dari program transparansi serta pengawasan pendidikan yang sudah berjalan sejak tahun 2023. Hal ini relevan sebagai data pendukung karena menunjukkan kesinambungan kebijakan.

Dalam berita tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Farhan, menegaskan bahwa transparansi adalah indikator utama dalam sistem penerimaan peserta didik. Pernyataan beliau sangat jelas dan kuat:

"Ini menjadi indikator bahwa sistem penerimaan yang transparan sangat krusial... bentuk nyata kita menjaga kualitas kerja dan integritas layanan publik."

Kutipan ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya jargon administratif, tetapi menjadi komitmen kelembagaan yang terus diperbaiki setiap tahun, termasuk pada periode 2023.

Lebih jauh, Farhan juga menyampaikan bahwa pengawasan diperketat melalui pengiriman tim khusus yang bertugas memantau langsung sekolah-sekolah tanpa diketahui publik. Hal ini mencerminkan adanya langkah nyata untuk menghindari kecurangan, pungutan liar, dan intervensi politik dalam proses pendidikan. Pernyataan berikut menguatkan hal tersebut:

"Kita kompak jaga proses ini... Kalau ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, saya siap minta dukungan aparat."

Pernyataan ini menunjukkan sinergi antara Disdik, kepolisian, kejaksaan, dan TNI dalam menjaga integritas proses pendidikan. Upaya kolaboratif seperti ini paralel dengan berbagai berita tahun 2023, seperti penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelaporan BOS, serta pembenahan sistem SIPD.

Tidak hanya itu, Farhan mengonfirmasi bahwa tidak ditemukan transaksi mencurigakan dalam proses SPMB. Walaupun konteksnya tahun 2025, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang mulai disempurnakan sejak 2023 sudah menunjukkan hasil positif.

"Alhamdulillah tidak ada pelaku yang terbukti. Mereka mundur teratur ketika kita gebrak-gebrak."

Narasi ini memperkuat kesimpulan bahwa reformasi administrasi pendidikan Kota Bandung bukan hanya formalitas, melainkan usaha jangka panjang yang sudah dimulai sejak 2023 dan terus dievaluasi.



Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Foto: Istimewa

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Anggaran pendidikan Kota Bandung pada 2023 mencapai Rp1,9 triliun atau 26 persen dari Rp7,2 triliun APBD. Sekitar Rp90 miliar di antaranya dianggarkan guna membantu siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, langkah itu dilakukan sebagai upaya Pemkot Bandung untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) terbaik di setiap generasi. Dengan anggaran sebesar itu, Yana enggan ada lagi anak usia sekolah di Kota Bandung yang tidak bersekolah.

Gambar 2. Rp1,9 Triliun APBD Kota Bandung Tersedot ke Sektor Pendidikan

Besarnya perhatian Pemerintah Kota Bandung terhadap sektor pendidikan tercermin dari berita resmi yang menyebutkan bahwa sekitar Rp 1,9 triliun APBD Kota

Bandung terserap ke sektor pendidikan sepanjang tahun 2023. Menurut laporan tersebut, tingginya alokasi anggaran ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

“Sebanyak Rp 1,9 triliun APBD Kota Bandung tersedot untuk sektor pendidikan pada tahun anggaran 2023.”

Kutipan ini secara langsung menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sektor dengan porsi anggaran terbesar, sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan yang jauh lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

Berita tersebut juga menegaskan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk operasional sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Disampaikan pula:

“Anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang operasional sekolah, peningkatan kualitas sarana pendidikan, serta pendanaan program-program wajib belajar.”

Keterangan ini penting karena dana operasional dan belanja sekolah termasuk kategori yang paling sering membutuhkan jurnal penyesuaian, seperti penyesuaian beban barang/jasa, beban utilitas, dan realisasi BOS. Selain itu, pemerintah Kota Bandung menekankan bahwa besarnya anggaran pendidikan harus diiringi dengan tata kelola yang baik. Hal ini terlihat dari kutipan berikut:

“Pemerintah Kota Bandung meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, memastikan agar setiap penggunaan anggaran dicatat dan dilaporkan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Kutipan tersebut mendukung urgensi penerapan **jurnal penyesuaian** sesuai SAP akrual, terutama karena kesalahan dalam pengakuan pendapatan, belanja, atau penyusutan dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Berita ini menegaskan bahwa pengawasan publik terhadap alokasi pendidikan sangat tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan:

“Dengan anggaran yang begitu besar, transparansi dan pelaporan yang benar menjadi kunci agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pembangunan sektor pendidikan.”

Pernyataan ini selaras dengan fokus penelitian jurnal yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan jurnal penyesuaian pada SKPD khususnya Dinas Pendidikan dalam mengelola anggaran.

Berita Mengindikasikan Permasalahan dan Tantangan Transparansi sebagai Landasan Pencatatan Akuntansi Daerah

Transparansi memiliki hubungan langsung dengan kualitas penyajian laporan keuangan. Sistem akuntansi akrual mengharuskan setiap SKPD untuk mengakui pendapatan dan beban pada saat timbul hak dan kewajiban, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Dengan demikian, setiap transaksi harus dicatat secara terbuka, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung, transparansi ditunjukkan melalui berbagai langkah strategis pemerintah kota, seperti pembenahan sistem informasi publik, peningkatan pelaporan berbasis digital, dan pengawasan terhadap proses pelayanan pendidikan. Berbagai berita resmi menunjukkan bahwa pemerintah kota memperkuat

sistem informasi publik, meningkatkan pengawasan internal, serta menekankan pentingnya pelayanan pendidikan yang adil, akurat, dan dapat dipantau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya transparansi sudah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pencatatan pendapatan dan beban pendidikan.

Peningkatan transparansi ini secara langsung memengaruhi keakuratan jurnal penyesuaian, karena setiap penyesuaian pendapatan, beban, aset, maupun kewajiban harus dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh publik maupun auditor.

Akuntabilitas sebagai Prinsip Utama dalam Jurnal Penyesuaian

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Pada tahun 2023, sektor pendidikan Kota Bandung menyerap anggaran sangat besar, yaitu mencapai **Rp 1,9 triliun**. Besarnya anggaran ini menunjukkan bahwa SKPD, termasuk Dinas Pendidikan, harus menerapkan akuntansi yang ketat untuk menghindari kesalahan pencatatan, penyimpangan anggaran, atau ketidaksesuaian laporan.

Dalam praktiknya, berbagai transaksi pendidikan membutuhkan jurnal penyesuaian agar pencatatan sesuai dengan SAP akrual, seperti: Pendapatan BOS yang diterima di akhir tahun, Belanja barang dan jasa yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar, penyusutan aset sekolah, Pendapatan retribusi yang belum ditagihkan, Beban utilitas yang baru dibayar pada awal tahun berikutnya.

Tanpa jurnal penyesuaian yang benar, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang salah, terutama pada SKPD pendidikan yang beroperasi dengan volume transaksi tinggi. Akuntabilitas ini menjadi semakin penting karena sektor pendidikan termasuk area yang paling sering dipantau masyarakat.

Diskusi Berdasarkan Teori Akuntabilitas Publik dan Stewardship

Dari perspektif Teori Akuntabilitas Publik, kesalahan dalam jurnal penyesuaian mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban publik. Ramadhani & Afiqoh (2025) menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah wujud tanggung jawab pemerintah kepada publik atas pengelolaan dana publik. Jika jurnal penyesuaian tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, maka laporan keuangan menjadi kurang relevan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah.

Lebih jauh, teori ini menggarisbawahi bahwa akuntabilitas publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral. Aparatur publik memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan setiap angka dalam laporan keuangan merepresentasikan kondisi faktual. Dalam kasus Dinas Pendidikan Kota Bandung, ketidaksesuaian jurnal penyesuaian antara SKPD dan PPKD menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum berjalan efektif sebagai alat kontrol akuntabilitas vertikal dan horizontal.

Dari sisi Teori Stewardship, hubungan antara PPKD dan SKPD menggambarkan relasi kepercayaan antara *steward* dan *principal*. Menurut Wiyana, Sufiati, & Nurasratunnisa (2023), keberhasilan pengelolaan keuangan daerah ditentukan oleh sejauh mana aparatur

memahami tanggung jawabnya sebagai pengelola sumber daya publik, bukan sekadar pelaksana administratif.

Dalam praktiknya, staf keuangan Dinas Pendidikan sering menghadapi dilema antara kepatuhan administratif dan tanggung jawab substantif terhadap akurasi laporan. Misalnya, karena tekanan waktu menjelang penutupan tahun anggaran, beberapa penyesuaian dilakukan tanpa dokumen pendukung lengkap. Hal ini menimbulkan risiko kesalahan yang dapat memengaruhi opini BPK terhadap LKPD.

Dengan demikian, *stewardship* dalam konteks ini tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga integritas moral aparatur. Aparatur yang memiliki kesadaran *stewardship* akan berupaya memastikan setiap transaksi dicatat dengan akurat meskipun tidak diawasi langsung oleh atasan atau auditor.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa studi nasional yang menunjukkan bahwa penerapan SAP akrual masih menghadapi tantangan implementatif.

- a. Safitri (2024) menemukan bahwa kurangnya kompetensi aparatur menjadi penyebab utama kesalahan jurnal penyesuaian di kabupaten Semarang.
- b. Aprilia (2025) menyoroti belum optimalnya penggunaan SIPD dalam mendukung pencatatan akrual di Palembang.
- c. (Nilamsari, n.d.) menunjukkan bahwa integrasi sistem keuangan dan pengawasan internal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- d. Secara internasional, (Ashari, 2025)) mengonfirmasi bahwa faktor budaya birokrasi dan resistensi perubahan juga berkontribusi terhadap keterlambatan implementasi akuntansi akrual di Indonesia.

Temuan-temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa masalah utama bukan pada aturan, tetapi pada komitmen implementasi dan koordinasi lintas unit. Dinas Pendidikan sebagai entitas teknis harus bekerja sama erat dengan PPKD agar proses penyesuaian jurnal menjadi bagian integral dari siklus akuntansi, bukan pekerjaan tambahan di akhir tahun.

Implikasi Praktis dan Akademik

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan integrasi sistem SIPD dan pelatihan teknis bagi aparatur keuangan di Dinas Pendidikan. Sistem pencatatan berbasis akrual harus diotomatisasi agar jurnal penyesuaian dapat dilakukan tepat waktu dan seragam antarunit.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan relevansi teori akuntabilitas publik dan *stewardship* dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi fiskal. Akuntabilitas publik mendorong transparansi dan keterbukaan, sementara *stewardship* menekankan komitmen moral aparatur untuk bertindak sebagai pelayan publik.

Kombinasi kedua teori ini menciptakan kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa reformasi akuntansi publik sering gagal bukan karena lemahnya regulasi, tetapi

karena kesenjangan antara tanggung jawab formal dan moral dalam birokrasi keuangan daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem akuntansi PPKD dan SKPD di Dinas Pendidikan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa proses jurnal penyesuaian pendapatan dan beban belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akrual yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perbedaan perlakuan akuntansi antara SKPD yang cenderung berbasis kas dan PPKD yang menerapkan basis akrual menimbulkan selisih pada laporan keuangan daerah. Faktor penyebab utama berasal dari keterbatasan kompetensi aparatur, belum optimalnya integrasi sistem SIPD, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan prinsip stewardship belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan pendidikan daerah. Oleh karena itu, reformasi akuntansi sektor publik di daerah harus diarahkan tidak hanya pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada pembangunan etika profesional dan tanggung jawab moral aparatur sebagai pengelola dana publik.

Saran

1. Peningkatan Kompetensi SDM:

Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan teknis akuntansi akrual dan penyusunan jurnal penyesuaian secara berkala bagi aparatur SKPD dan PPKD, khususnya bagi staf keuangan di sektor pendidikan.

2. Integrasi dan Otomatisasi Sistem SIPD:

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat fitur integrasi antara modul pelaksanaan anggaran SKPD dan pelaporan PPKD agar jurnal penyesuaian dapat dilakukan otomatis, mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan.

3. Penguatan Pengawasan dan Etika Stewardship:

Perlu dibangun mekanisme pengawasan internal berbasis nilai akuntabilitas publik dan etika stewardship agar aparatur tidak hanya patuh pada aturan formal, tetapi juga memiliki kesadaran moral dalam melaporkan keuangan publik secara jujur dan transparan.

Referensi

- Alozie, C.E. (2020). Fund accounting and government-wide financial reporting during the Pre-IPSAS implementation era from a Nigerian experience. *Journal of Public Budgeting Accounting and Financial Management*, 32(3), 339-358, ISSN 1096-3367, <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-01-2019-0017>
- Aprilia, N. ., Satriawan, I. ., & Dwitayanti, Y. . (2025). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Penerapan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang. *Permana : Jurnal Perpajakan*,

- Manajemen, Dan Akuntansi, 17(3), 1317–1333.
<https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1050>
- Ashari, M. M. (2025). Accrual Accounting Compliance Drivers: An Indonesian Public Sector Study. *Journal of Accounting Science*, 9(1), 97–113.
<https://doi.org/10.21070/jas.v9i1.1931>
- Chen, J. (2020). Household sector innovation in China: Impacts of income and motivation. *Research Policy*, 49(4), ISSN 0048-7333, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103931>
- Cheng, Y. (2021). The Structure of Commercial Forests "Tending to Become Economic Forests": An Analysis of Causes Based on Labor Cost Effects and Relative-Revenue Effects. *Linye Kexue Scientia Silvae Sinicae*, 57(7), 184-193, ISSN 1001-7488, <https://doi.org/10.11707/j.1001-7488.20210720>
- Columbano, C. (2022). Selective application of the accrual principle in the construction of government finance statistics: EU evidence. *Public Money and Management*, 42(7), 511-520, ISSN 0954-0962, <https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2065051>
- Fees, W. (2022). Financial performance analysis of German firms after Chinese mergers and acquisitions. *Review of International Business and Strategy*, 32(3), 405-422, ISSN 2059-6014, <https://doi.org/10.1108/RIBS-10-2020-0129>
- Gollah, S. N., Paranoan, S., Yamin, N. Y., & Masruddin, M. (2025). Evaluation of Regional Revenue and Expenditure Budgets in the Palu City Government. *Journal of Applied Accounting*, 4(1), 50–56. <https://doi.org/10.52158/jaa.v4i1.1223>
- Kapaya, S.M. (2023). Government expenditure impacts on financial development: Do population age structures moderations matter?. *Review of Economics and Political Science*, 8(5), 330-352, ISSN 2356-9980, <https://doi.org/10.1108/REPS-01-2023-0008>
- Kumbeni, M.T. (2023). An assessment of out of pocket payments in public sector health facilities under the free maternal healthcare policy in Ghana. *Health Economics Review*, 13(1), ISSN 2191-1991, <https://doi.org/10.1186/s13561-023-00423-0>
- Kyriakidou, E. (2020). Financial crisis and public reforms: Moving from public administration to public management. Cost allocation and performance information for decision-making process in the public sector. The case of the Greek public sector under the Greek crisis. *Ceur Workshop Proceedings*, 2761, 252-262, ISSN 1613-0073
- Lucas, D. (2023). Reflections on What Financial Economics Can and Cannot Teach Us about the Social Discount Rate. *Annual Review of Financial Economics*, 15, 185-195, ISSN 1941-1367, <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-041123-123258>

- Masum, M.A. (2024). The interface between traditional organisational practices and a World Bank-led performance management reform. *Meditari Accountancy Research*, 32(5), 1931-1976, ISSN 2049-372X, <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2023-2041>
- Meliawati, D., Dirgantari, N., Hariyanto, E., Pratama, B. C., Financing, I., Financing, I., Performance, A., & Financing, I. (2022). the Effect of Local Revenue on Capital Expenditure , Infrastructure Financing , Government Accountability Performance System and Budget. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 6(4), 1779–1794.
- Nilamsari, F. A. (n.d.). Implementasi akuntansi sektor publik dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak (JIMAT)*, 12(1), 80–95.
- Prinja, S. (2024). Framework for responsive financing of district hospitals of India. *Frontiers in Public Health*, 12, ISSN 2296-2565, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1398227>
- Putri, A. R. D. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan penerapan SAP dan SAKD (Studi pada Kota Pekanbaru). *JUMIA: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 215–228.
- Ramadhani, A. M., & Afiqoh, N. W. (2025). Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1861–1873. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5306>
- Ridwan, R., Lestari, D., & Nurhadi, A. (2025). Analisis penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 8(1), 212–227.
- Rosana, L., Putra, H., & Ningsih, M. (n.d.). Penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah: Kajian empiris implementasi SAP di Indonesia. *European Academic Journal of Management Research (EAJMR)*, 5(4), 133–148
- Safitri, M. (n.d.). Peran penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem informasi keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi (JREA)*, 6(2), 134–150.
- Simanjuntak, S. D., Sihalohe, M. R., & Pangaribuan, A. (2024). Pengaruh implementasi SAP dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 101–118.
- Sulis, G. (2021). Research article sales of antibiotics and hydroxychloroquine in India during the covid-19 epidemic: An interrupted time series analysis. *Plos Medicine*, 18(7), ISSN 1549-1277, <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003682>

-
- Wiyana, A., Sufiati, S., Sambo, E. M., & Nurasratunnisa, Y. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 240. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1588>
- Wulandary, A. (2022). Implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi di Kota Sorong). *FAIR Journal*, 3(2), 88–100.